

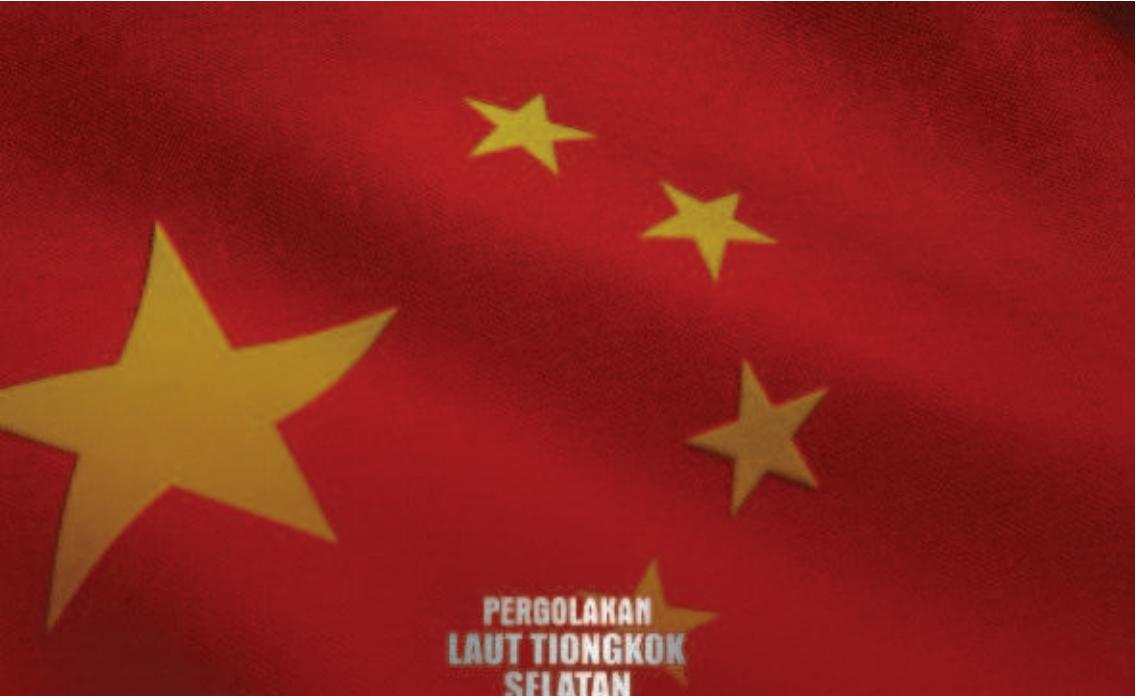


PERGOLAKAN LAUT TIONGKOK SELATAN

**HAMBATAN BAGI TIONGKOK MENJADI
BENEVOLENT HEGEMON**



**Arief Bakhtiar Darmawan
Agus Haryanto**



PERGOLAKAN LAUT TIONGKOK SELATAN

HAMBATAN BAGI TIONGKOK MENJADI BENEVOLENT HEGEMON

Sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu sengketa yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Sebagai negara yang mengklaim sebagian besar wilayah di LTS, Tiongkok merupakan negara yang gigih dalam mempertahankan klaim wilayahnya. Hal yang menarik dari sengketa ini adalah perilaku luar negeri Tiongkok yang menekankan aktivitas militer dan diplomasi damai sekaligus dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan.

Buku monograf ini berupaya menganalisis dua perilaku yang cenderung bertolak belakang dalam kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut.

Sebagai sebuah monograf, kajian dalam buku ini merupakan pelengkap dari studi-studi yang pernah dipublikasikan oleh penulis dalam berbagai jurnal ilmiah. Secara garis besar, studi penulis mengenai sengketa LTS tidak bisa lepas dari tiga kata kunci utama, yaitu ASEAN, Tiongkok, dan LTS. Buku monograf ini fokus pada dua kata kunci, yaitu Tiongkok dan LTS, sebagai bahasan utama. Analisis mendalam mengenai Tiongkok dan LTS diharapkan dapat memperkaya studi-studi bertema serupa dalam hubungan internasional kontemporer.



eureka
media olahraga
Anggota IKAPI
No. 225-U/E/2021

- ④ 0858 5343 1992
- ✉ eurekamediaaksara@gmail.com
- 📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202308369



**PERGOLAKAN LAUT TIONGKOK
SELATAN
HAMBATAN BAGI TIONGKOK MENJADI
BENEVOLENT HEGEMON**

**Arief Bakhtiar Darmawan, S.I.P., M.A.
Dr. Agus Haryanto**



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERGOLAKAN LAUT TIONGKOK SELATAN
HAMBATAN BAGI TIONGKOK MENJADI BENEVOLENT
HEGEMON**

Penulis : Arief Bakhtiar Darmawan, S.I.P., M.A.
Dr. Agus Haryanto

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Ahmad Yusuf Efendi, S.Pd.

ISBN : 978-623-487-639-0

No. HKI : EC00202308369

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku monograf ini merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Pergolakan Laut Tiongkok Selatan : Hambatan Bagi Tiongkok Menjadi Benevolent Hegemon**". Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu sengketa yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Sebagai negara yang mengklaim sebagian besar wilayah di LTS, Tiongkok merupakan negara yang gigih dalam mempertahankan klaim wilayahnya. Hal yang menarik dari sengketa ini adalah perilaku luar negeri Tiongkok yang menekankan aktivitas militer dan diplomasi damai sekaligus dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan.

Buku monograf ini berupaya membahas dua perilaku yang cenderung bertolak belakang dalam kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut. Di satu sisi, Tiongkok terlihat bersikap ambigu. Di sisi lain, hal itu bisa kita tangkap sebagai suatu strategi yang relatif berhasil dalam mengamankan klaimnya sebagai hegemon di kawasan. Dalam jangka panjang, jika Tiongkok salah melangkah, pergolakan di LTS ini berpotensi menjadi hambatan bagi posisi Tiongkok sebagai hegemon.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Laut Tiongkok Selatan	1
B. Hegemoni Laut Tiongkok Selatan.....	5
BAB 2 TIONGKOK DALAM SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN.....	12
A. Klaim Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	12
1. Klaim Tiongkok.....	14
2. Klaim Taiwan	15
3. Klaim Vietnam.....	16
4. Klaim Filipina	17
5. Klaim Malaysia.....	18
6. Klaim Brunei Darussalam.....	18
B. Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan	20
BAB 3 SIKAP POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK ATAS ISU LAUT TIONGKOK SELATAN.....	27
A. Sikap Tiongkok dalam Pertemuan Regional dan Multilateral.....	27
1. Fase Perilaku Pasif dan Defensif.....	29
2. Fase Perilaku Aktif	30
3. Fase Perilaku Penuh Inisiatif	31
4. Fase Perilaku Asertif	33
B. Sikap Tiongkok di Lautan.....	35
1. Fase Penguatan Angkatan Laut	35
2. Fase Agresif di Lautan	39
BAB 4 PERILAKU TIONGKOK SEBAGAI HEGEMON: <i>LIKEABLE SUPERPOWER</i>	47
A. Perilaku Tiongkok sebagai Hegemon	47
B. Hegemoni Moderat dan Hegemoni Keras	55
BAB 5 PENUTUP.....	64

DAFTAR PUSTAKA	70
INDEKS.....	79
TENTANG PENULIS	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tumpang Tindih Klaim di Laut Tiongkok Selatan Sumber: Watkins, 2014.	2
Gambar 2. 1 Peta Klaim Sengketa Kawasan Laut Tiongkok Selatan Sumber: Thomson Reuters, 2013.....	14
Gambar 3. 1 Peta Klaim Tiongkok tahun 1947 dan 2009 atas Laut Tiongkok Selatan Sumber: Shannon Van Sant, 2014.....	24
Gambar 3. 2 Klaim Sepuluh Garis Putus-putus Berbentuk “U” di Laut Tiongkok Selatan dalam Map Resmi Tiongkok tahun 2014 Sumber: South China Morning Post, 2014	25
Gambar 4. 1 Perdagangan antara ASEAN dengan Tiongkok dan ASEAN dengan Jepang (dalam juta dollar AS).....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Dasar Klaim di Laut Tiongkok Selatan	19
Tabel 2. 2 Rilis Peta Nasional di Wilayah Klaim	20
Tabel 2. 3 Perkembangan Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan.....	21
Tabel 3. 1 Insiden dan Bentrok Bersenjata di Laut Tiongkok Selatan, 1990-2000.....	37
Tabel 3. 2 Insiden dan Bentrok Bersenjata di Laut Tiongkok Selatan, 2001-2018.....	41
Tabel 4. 1 Ekspor, Investasi ke Luar Negeri, dan Bantuan Luar Negeri Tiongkok (1990-2016) (dalam juta dollar AS)	53
Tabel 4. 2 Persamaan dan Perbedaan Hegemoni Tiongkok dalam Forum Multilateral dan Aksi Agresif di Lautan	60



**PERGOLAKAN LAUT TIONGKOK
SELATAN
HAMBATAN BAGI TIONGKOK MENJADI
*BENEVOLENT HEGEMON***

Arief Bakhtiar Darmawan, S.I.P., M.A.
Dr. Agus Haryanto



BAB

1 | PENDAHULUAN

A. Sejarah Laut Tiongkok Selatan

Tiongkok merupakan salah satu pihak yang memiliki klaim langsung di Laut Tiongkok Selatan (LTS).¹ LTS adalah laut dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas itu mencakup 39 persen dari total luas wilayah laut Asia Tenggara yang berkisar sekitar 8,9 juta kilometer persegi, dan mencakup 2,5 persen dari total luas laut dunia (Zhi Guo, 2005: 330). Di tengah-tengah LTS terdapat dua kepulauan yang menjadi perselisihan antarpihak yang mengelilinginya, yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Dua kepulauan tersebut tak pernah tercatat dihuni secara tetap seluruhnya oleh manusia karena kebanyakan hanya berupa karang-karang kecil (Dam, 2010: 242). Kep. Spratly terdiri lebih dari 100 pulau kecil, karang, beting, dan gundukan daratan. Sementara Kepulauan Paracel terletak agak di utara dan terdiri dari 15 pulau dan beberapa beting dan karang (Lo, 1989: 10).

Pihak-pihak lain yang memiliki klaim langsung di LTS adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei

¹ Pemilihan pemakaian kata “Tiongkok” dalam buku ini mengacu pada Keputusan Presiden No. 12/2014 yang ditandangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014. Keppres tersebut mengganti istilah “China” menjadi “Tionghoa” atau “Tiongkok”. Dengan keppres tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut dan menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang mengatur penggunaan kata “China” tidak berlaku lagi.

BAB

2

TIONGKOK DALAM SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

A. Klaim Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Klaim wilayah di LTS mulai muncul pasca-PD II atau setelah Jepang kalah perang. Sebelumnya, pada masa kolonial abad 18, pertentangan akibat LTS belum ada di antara negara-negara penjajah. Namun, pada era ini negara penjajah, terutama Inggris dan Prancis, menampilkan hal baru di daerah yang mereka duduki di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara jajahan dengan basis kedaulatan teritorial. Inggris, misalnya, membangun Singapura sebagai kota pelabuhan dan membangun Malaya dan Borneo Utara. Langkah tersebut diikuti Belanda yang membangun "Hindia-Belanda" dan Spanyol yang memperkuat cengkeraman mereka atas Filipina. Prancis kemudian melakukan kolonisasi dan menguasai Indocina. Menjelang berakhirnya abad ke 18, Jepang memenangi perang dengan Tiongkok menggunakan kekuatan angkatan lautnya. Amerika Serikat tak ketinggalan, dengan memenangi perang melawan Spanyol dan menguasai Filipina. Lima kekuatan laut terbesar di dunia berkumpul: Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, dan AS (Tønnesson, 2001: 6-7).

Menurut Departemen Luar Negeri Indonesia, Tiongkok merupakan satu-satunya negara pengklaim seluruh Kep. Spratly sampai Perang Dunia I, saat Jerman melakukan ekspedisi ke kepulauan tersebut pada tahun 1883. Tiongkok melakukan klaim atas dasar penemuan pertama. Sementara untuk klaim atas Kep. Paracel, Tiongkok telah menyatakan

BAB 3

SIKAP POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK ATAS ISU LAUT TIONGKOK SELATAN

A. Sikap Tiongkok dalam Pertemuan Regional dan Multilateral

Sebelum membahas mengenai perilaku Tiongkok dalam politik luar negeri, ada tiga karakter yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang mempertajam perilaku politik luar negeri Tiongkok (Varral, 2015: 3-5). Pertama, kebijakan luar negeri harus diarahkan pada keberlangsungan Partai Komunis Tiongkok. Artinya, tidak boleh ada kebijakan luar negeri yang berpotensi untuk menghancurkan legitimasi Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok. Pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Tiongkok biasanya merupakan pimpinan-pimpinan partai, baik itu dalam level pusat maupun level daerah. Dalam konteks politik luar negeri, dari tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok, partai memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengarahkan pesan politik dan sosial tertentu ke dalam kehidupan rakyat Tiongkok yang sesuai dengan kepentingan Partai Komunis Tiongkok.

Kedua, perspektif Partai Komunis Tiongkok mengenai politik luar negeri harus sampai kepada masyarakat luas. Pada era globalisasi saat ini, negara besar seperti Tiongkok hampir mustahil untuk mengontrol informasi sepenuhnya kepada masyarakat luas. Jumlah rakyat Tiongkok yang melakukan perjalanan ke luar negeri terus mengalami peningkatan, sehingga akses terhadap informasi dari luar tidak mungkin

BAB

4

PERILAKU TIONGKOK SEBAGAI HEGEMON: *LIKEABLE SUPERPOWER*

A. Perilaku Tiongkok sebagai Hegemon

Menurut hasil pengamatan penulis, seperti yang akan dipaparkan dalam bagian ini, Tiongkok berusaha menjalankan peran sebagai hegemon, baik dalam forum-forum multilateral yang membicarakan isu LTS maupun di lautan. Baik dalam forum multilateral maupun di lautan, Tiongkok selalu mengejar kepentingannya atas klaim di LTS dan berusaha mewujudkan stabilitas kawasan untuk kepentingannya sendiri. Menurut Robert Gilpin, negara yang berperilaku sebagai hegemon memiliki tiga karakteristik perilaku. Pertama, negara hegemon berperilaku merugikan negara lain dan mementingkan diri sendiri. Kedua, hegemon selalu berusaha menginginkan tatanan tertentu demi mewujudkan kepentingan nasionalnya. Ketiga, hegemon berusaha meningkatkan kekuatannya untuk menekan negara-negara kecil di sekitarnya (Shaohua, 2006: 41; Destradi, 2008: 12).

Dalam kasus Tiongkok, karakteristik *perilaku merugikan negara lain demi mementingkan diri sendiri* ditunjukkan dengan perilaku Tiongkok yang memicu beberapa insiden, merebut area, dan menyerang kapal-kapal negara lain di area sengketa dengan berbagai dalih. Pada tahun 2011 dan 2012, Tiongkok berulangkali memutus kabel survei seismik yang dipasang Vietnam. Hal itu dilakukan sebagai upaya menganggu aktivitas Vietnam yang berkaitan dengan penambangan minyak. Insiden pemotongan kabel itu dilakukan oleh kapal

BAB

5 | PENUTUP

Tiongkok merupakan salah satu pihak yang memiliki klaim langsung atas penguasaan wilayah di LTS, selain Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Tiongkok menegaskan bahwa klaimnya atas LTS didasari oleh alasan historis. Sejak abad ke 2 SM, pada masa Dinasti Han berkuasa, Tiongkok telah menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau di gugusan Kep. Spratly maupun Kep. Paracel. Setelahnya, dinasti-dinasti berikutnya turut memanfaatkan kedua kepulauan tersebut untuk kepentingan ekonomi, militer, maupun ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, peta teritorial Tiongkok yang dipublikasikan pada tahun 1760, 1784, 1866, dan 1897 masih menempatkan Pulau Hainan sebagai titik paling selatan wilayah kedaulatan Tiongkok. Pada tahun 1909, Gubernur Guangdong Zhang Yen Jun melakukan ekspedisi untuk menguasai Kep. Paracel, dan setelahnya memasukkan Kep. Paracel sebagai salah satu bagian dari Provinsi Guangdong. Pada tahun 1912, setelah keruntuhan Dinasti Qing, konstitusi pertama Republik Rakyat Tiongkok menyebutkan bahwa "The sovereign territory of the Republic of China continues to be the same as the domain of the former Empire". Kep. Spratly baru menjadi perhatian Tiongkok pada tahun 1935, ketika Tiongkok mulai melakukan pendataan nama-nama pulau yang meliputi Kep. Paracel dan Kep. Spratly. Pada tahun 1936, ahli geografi Tiongkok Bai Meichu membuat atlas yang menggambarkan klaim berbentuk "U" di LTS. Pada tahun 1947, Tiongkok mengklaim garis "U" dengan sebelas garis putus-putus di LTS sebagai garis penengah

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Acharya, A. (2009). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order*, 2nd ed. New York: Routledge.
- Asnani, U. & Sukma, R. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan bagi ASEAN*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Blazevic, J. J. (2012). Navigating the Security Dilemma: China, Vietnam, and the South China Sea. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31(4), 79-108.
- Burchill, S., et.al. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cheng-Chwee, K. (2005). Multilateralism in China's ASEAN Policy: Its Evolution, Characteristics, and Aspiration. *Contemporary Southeast Asia*, 27(1), 102-122.
- Cheng, T. (1975). The Dispute Over the South China Sea Islands. *Texas International Law Journal*, 10.
- Cooper, B. (Ed.). (1981). *Far East Oil and Energy Survey 1981*. Geneva and Dublin: Petroleum Economics and Petroconsultantatas.
- Cox, R. W. (1983). Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. *Millenium: Journal of International Studies*, 12(2). 162-174.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dam, S. (2010). *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawan, A. B. (2018). Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 13-35.

- Darmawan, A. B. & Mahendra, L. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 79-100.
- Dawson, C. (2007). *A Practical Guide to Research Methods*, 3rd Edn. Oxford: How To Books.
- Destradi, S. (2008). Empire, Hegemony, Leadership: Developing A Research Framework for the Study of Regional Powers. *GIGA Working Paper*, No. 79.
- Evans, T. (2003). The PRC's Relationship with the ASEAN Regional Forum: Realpolitik, Regime Theory or a Continuation of the Sinic Zone of Influence System? *Modern Asian Studies*, 37(3), 737-763.
- Foot, R. (1998). China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Process and Domestic Modes of Thought. *Asian Survey*, 38(5), 425-440.
- Garver, J. (1992). China's Push through the South China Sea: The Interaction of Bureaucratic and National Interests. *The China Quarterly*, 132, 999-1028.
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldman, J. (2013). President Aquino's second half: Minimum credible defense in contested waters? *China Brief*, 13(13). Washington, DC: Jamestown Foundation.
- Goldstein, L. (2011). Chinese Naval Strategy in the South China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but Little Fire. *Contemporary Southeast Asia*, 33(3), 320-347.
- Green, D. J. (2016). *The Third Option for the South China Sea: The Political Economy of Regional Conflict and Cooperation*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Haryanto, A. & Bainus, A. (2017). Peran Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

- Haryanto, A. & Darmawan, A. B. (2015). Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman bagi Komunitas Keamanan ASEAN? *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 277-292.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. New Haven and London: Yale University Press.
- Hurrell, A. (2005). Pax Americana or the empire of insecurity? *International Relations of the Asia-Pacific*, 5(2), 153-176.
- Ikenberry, J. G., & Kupchan, C. A. (1990a). Socialization and hegemonic power. *International Organization*, 44(3), 283-315.
- Ikenberry, J. G., & Kupchan, C. A. (1990b). The Legitimation of Hegemonic Power. Dalam David P. Rapkin (Ed.), *World Leadership and Hegemony*, 49-69. Boulder, Col./ London: Lynne Rienner.
- International Crisis Group. (2012a). *Stirring up the South China Sea (I)*. Brussels: International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2012b). *Stirring up the South China Sea (II): Regional Responses*. Brussels: International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2015). *Stirring up the South China Sea (III): A Fleeting Opportunity for Calm*. Brussels: International Crisis Group.
- Ji, Y. (1995). A Test Case for China's Defence and Foreign Policies. *Contemporary Southeast Asia*, 16(4), 375-403.
- Kindleberger, C. P. (1973). *The World in Depression, 1929-1939*. Berkeley: University of California Press.
- Kindleberger, C. P. (1981). Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Ride. *International Studies Quarterly*, 25(2), 242-254.
- Lanteigne, M. (2009). *Chinese Foreign Policy: An Introduction*. London & New York: Routledge.
- Lo, C. (1989). *China's Policy Toward Territorial Disputes: The Case of the South China Sea Islands*. London and New York: Routledge.

- Machiavelli, N. 1515. *The Prince*. Constitution Society.
- Medeiros, E. S. (2009). *China's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Odgaard, L. (2001). Deterrence and co-operation in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 23(2), 292-306.
- Ragin, C. (2011). Turning the Tables: How Case-Oriented Research Challenges Variable-Oriented Research. Dalam *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*, dieldit oleh Henry E. Brady dan David Collier. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Rapkin, D. P. (1990). The Contested Concept of Hegemonic Leadership. Dalam David P. Rapkin (Ed.), *World Leadership and Hegemony*, 1-19. Boulder, Col./ London: Lynne Rienner.
- Shambaugh, D. (2013). *China Goes Global: The Partial Power*. New York: Oxford University Press.
- Snidal, D. (1985). The limits of hegemonic stability theory. *International Organization*, 39(4), 579-614.
- Suehiro, A. (2017). China's offensive in Southeast Asia: regional architecture and the process of Sinicization. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 6(2), 107-131.
- Tønnesson, S. (2001). *An International History of the Dispute in the South China Sea*. EAI Working Paper, No. 71.
- Turcsányi, R. Q. (2018). *Chinese Assertiveness in the South China Sea: Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy*. Switzerland: Springer International Publishing AG.
- Varrall, M. (2015). *Chinese worldviews and China's foreign policy*. Sydney: Lowy Institute.
- Wallerstein, I. (1984). *The Politics of the World-Economy: The States, the Movement, and the Civilizations*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Weatherbee, D. E. (2016). *Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea*. Perspective, ISEAS Yusof Ishak Institute, No. 18.
- Yoshihara, T. & Holmes, J. R. (2011). Can China Defend a “Core Interest” in the South China Sea? *The Washington Quarterly*, 34(2), 45-59.
- Yu, P. K. (2003). The Chinese (Broken) U-shaped Line in the South China Sea: Points, Lines, and Zones. *Contemporary Southeast Asia*, 25(3), 405-430.
- Zhao, Q. (1993). Patterns and Choices of Chinese Foreign Policy. *Asian Affairs*, 20(1), 3-15.
- Zhiguo, G. (2005). South China Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation. Dalam *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, diberitahukan oleh Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, dan Chin Kin Wah, 329-343. Singapura: ISEAS Publishing.

Makalah dan Dokumentasi Resmi

- Bainus, A., et.al. (2000). *Prospek Joint Development dan Joint Co-operation di Laut Cina Selatan sebagai Mekanisme Penghindaran Konflik di Kawasan: Suatu Perspektif Ekonomi-Politik dan Pertahanan dari Indonesia (2001-2003)*. Final Draft Penelitian. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Departemen Luar Negeri Vietnam. (1981). *White Paper on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes Vietnamese Territories*. Saigon: Departemen Luar Negeri Vietnam.
- Djalal, H., et.al. (1995). *Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama*. Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta: Yayasan Pusat Studi Asia Tenggara.

- Harini, S. (2002). *Politik Luar Negeri RRC terhadap Asia Tenggara dalam Sengketa Laut Cina Selatan*. Tesis Pascasarjana. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Shaohua, M. (2006). *China's Multilateralism and the South China Sea Conflict: Quest for Hegemonic Stability?* Tesis Pascasarjana. Singapore: National University of Singapore.
- Zachrisen, O. O. (2015). *China's political use of economic ties in territorial disputes: A comparative case study of Japan's and the Philippines reactions*. Tesis Pascasarjana. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology.

Artikel Internet

- ASEAN Secretariat. (2013). ASEAN's Free Trade Agreements. http://www.jterc.or.jp/koku_semina/pdf/130306_presentation_01.pdf (diakses 17 Juli 2018).
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2016). Island tracker. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies. <http://amti.csis.org/island-tracker/> (diakses 9 Maret 2019).
- Bloomberg. (2005). Vietnam Accuses China of Violating Law after Fishermen Killed. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aXAIKyExFU> (diakses 1 Juli 2018).
- Daily Mail. (2012). China throws 'birthday party' for new city at the heart of disputed South China Sea (of course, the neighbours weren't invited). <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178656/China-celebrates-birthday-Sansha-new-city-heart-disputed-South-China-Sea-course-neighbours-werent-invited.html> (diakses 1 Juni 2018).
- Fish, I. S. (2017). Is China Becoming the World's Most Likeable Superpower? *The Atlantic*.

<https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/06/china-jinping-trump-america-first-keqiang/529014/> (diakses 10 Maret 2019).

Gayou, D. G. (2014). New PRC Map is China's Latest Move in South China Sea Dispute. *The Daily Signal.* <http://dailysignal.com/2014/07/01/new-prc-map-chinas-latest-move-south-china-sea-dispute/> (diakses 1 Juni 2018).

Kompas. (2011). Vietnam Memprotes internasional.kompas.com/read/2011/06/06/03073711/Vietnam. Memprotes (diakses 18 Juni 2018).

Mearsheimer, J. (2012). Realism and The Rise of China. *Koc University*, 2 Oktober 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=D2e4OyNV8L8> (diakses 18 Juli 2018).

MOFA of the PRC. (2015). Wang Yi on the South China Sea Issue At the ASEAN Regional Forum. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1287277.shtml (diakses 21 Februari 2019).

People's Daily. (2016). *China opens S China Sea website.* <http://en.people.cn/n3/2016/0804/c90785-9094991.html> (diakses 24 Agustus 2018).

Pickrell, R. (2018). 'Leave immediately or you will pay': China is threatening foreign ships and planes, but the US military isn't changing a thing. <https://www.businessinsider.sg/china-warns-foreign-ships-planes-to-steer-clear-of-its-islands-or-pay-2018-7/> (diakses 4 September 2018).

Shahid, H. (2018). China on the Verge of Becoming the World's Most Likeable Superpower, Study Finds. *VIA News.* <https://via.news/asia/china-world-most-likeable-superpower-study/> (diakses 10 Maret 2019).

SIPRI. (2015). Recent Trends in Military Expenditure. <http://www.sipri.org/research/>

[armaments/milex/research/armaments/milex/research/armaments/milex/milex_database](http://www.milex.com/research/armaments/milex/research/armaments/milex/milex_database) (diakses 1 Juli 2018).

South China Morning Post. (2014). China asserts sovereignty over disputed South China Sea with new vertical map. <http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1540223/china-asserts-sovereignty-over-disputed-south-china-sea-areas-new?page=all> (diakses 27 Juli 2018).

Thayer, C. (2014). China's oil rig Gambit: South China Sea game-changer?. *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2014/05/chinas-oil-rig-gambit-south-china-sea-gamechanger/> (diakses 4 Maret 2019).

Lee, V. R. (2015). South China Sea: China is Building on the Paracels As Well. *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2015/04/south-china-sea-china-is-building-on-the-paracels-as-well/> (diakses 4 Maret 2019).

Lee, V. R. (2016). Satellite image analysis. <https://medium.com/satellite-image-analysis> (diakses 9 Maret 2019).

Thomson Reuters. (2013). South China Sea Territorial Disputes – Graphic of the Day. <http://blog.thomsonreuters.com/index.php/south-china-sea-territorial-disputes-graphic-of-the-day/> (diakses 27 Juni 2018).

Van Sant, Shannon. (2014). China Rejects US Report on Sea Claims. *Voice of America*. http://gdb.voanews.com/911648DD-8372-414C-89B7-83C9728DCD78_mw1024_s_n.jpg (diakses 27 Juli 2018).

Watkins, D. (2014). Territorial Disputes in the Waters Near China. *The New York Times*. <http://www.nytimes.com/interactive/2014/02/25/world/asia/claims-south-china-sea.html> (diakses 27 Juli 2018).

Wike, R., Poushter, J., Silver, L., & Bishop, C. (2017). Globally, More Name U.S. Than China as World's Leading Economic Power. Washington, D.C.: Pew Research Center. <http://www.pewglobal.org/2017/07/13/more-name-u-s-than-china-as-worlds-leading-economic-power/> (diakses 10 Maret 2019).

INDEKS

A

- agresif · 3, 35, 46, 62, 66, 68
aktif · 30, 31, 32, 46, 65
aktivitas · iii, 5, 35, 45, 46, 47,
50, 52, 62, 66
asertif · 33, 34, 46, 66
Asia Tenggara · 1, 5, 11, 12,
13, 17, 51, 55, 56, 58,
67, 74, 75, 79
-

B

- belanja militer · 36, 39, 51
bentrokan · 4, 35, 36, 38, 40,
51, 58, 61, 66, 68
beting · 1, 40, 48
-

D

- daquo zhanlue · 30
defensif · 13, 29, 40, 46, 65
Deng Xiaoping · 28, 29
Destradi · 5, 6, 8, 9, 10, 47, 55,
56, 71
dialog · 31, 52, 57, 65
dinasti · 3, 14, 15, 21, 64
diplomat · 77
-

E

- egoistik · 7, 56, 60
eksplosiasi · 15, 16, 18, 37, 42,
50

F

- faktor · 8, 27, 28, 31, 46, 62
flashpoint of conflict · 2
formal · 29, 31, 34, 65
-

G

- Gilpin · 7, 8, 47, 67, 71
Gramsci · 6, 70
-

H

- hegemoni moderat · 10
hexie shijie · 31
Hu Jintao · 28, 31, 59
-

I

- ideologi · 6, 10, 30
informal · 4, 29, 32, 65
inisiatif · 31, 32, 46, 52, 65
insiden · 20, 34, 36, 39, 40, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 58,
61, 63, 66, 68
internal · 31
internasionalisasi · 49
-

J

- Jiang Zhemin · 28, 30, 32
-

K

- kapal laut · 39, 44
keamanan · 17, 31, 49, 56, 59,
65

kekuatan militer · 4, 8, 15, 26, 28, 30, 66, 69

kepemimpinan · 5, 10, 31, 35, 62

kepentingan nasional · 7, 50, 68

Kepulauan Paracel · 1, 20, 23, 29, 42, 49

Kepulauan Spratly · 1, 15, 18, 19, 21, 29, 38, 45

kolektif · 8

komunisme · 56

konsensus · 4, 6, 8, 30, 32, 34, 57, 61, 68

kontrol · 18, 49, 50, 68

kooperatif · 6, 56, 68

L

legitimasi · 9, 10, 27, 55, 56, 61, 68

lokakarya · 4, 26, 29, 31, 32, 50

M

maritim · 2, 44, 48, 56, 59

menuduh · 37, 48, 49, 63

militär · iii, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68

modernisasi · 35, 39, 40, 59, 67

multilateral · 11, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 46, 47, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68

N

nilai · 9, 10, 56, 57, 60, 61, 68

norma · 8, 9, 10, 55

O

operasi · 17, 35

P

pasif · 30, 46, 65

pemimpin · 28, 52

Perang Dunia · 2, 12, 13, 17, 18

perdamaian · 4, 7, 31, 55, 62

perilaku · iii, 4, 6, 7, 9, 27, 28, 33, 34, 35, 46, 47, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67

perspektif · 8, 27, 48

pesawat · 18, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 51

politik luar negeri · 4, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 46, 60, 79

presiden · 28, 29, 58

produksi · 39

Q

Qian Qichen · 31

R

Realis · 8

S

spesies · 42, 48

subordinat · 6, 7, 9, 10

T

taiguang yanghui · 29, 30

teknologi · 35, 39

Tiongkok-Filipina · 3, 37, 38,
42, 45

Tiongkok-Vietnam · 3, 37, 41,
42, 43, 44

tumpang tindih · 2, 28

W

Wang Yi · 34, 76

Z

ZEE · 16, 18, 42, 44, 83

TENTANG PENULIS

ARIEF BAKHTIAR DARMAWAN, S.IP., M.A. merupakan dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis lulus dari program sarjana dan pascasarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, Arief Bakhtiar Darmawan dipercaya sebagai *Editor in Chief Insignia Journal of International Relations*, serta menjadi editor dan editor ahli di beberapa jurnal lainnya. Penulis memiliki minat studi terhadap regionalisme, politik internasional, dan ekonomi politik internasional, serta minat pada kawasan Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Asia Selatan, serta Timur Tengah. Tulisan-tulisan penulis dalam minat studi dan isu-isu tertentu kawasan telah dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi nasional ternama. Buku penulis sebelum ini berjudul *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara* yang terbit pada tahun 2020. Penulis bisa dihubungi melalui email arief.darmawan@unsoed.ac.id.

Dr. AGUS HARYANTO merupakan dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, yang telah memiliki minat sejak lama mengenai topik-topik terkait konflik Laut Tiongkok Selatan dan politik luar negeri. Pada tahun 2018, penulis berkesempatan menjadi dosen tamu di Jinan University, Tiongkok. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan melanjutkan program pascasarjana di Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia. Gelar doktoral ditempuh di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran. Saat ini, Dr. Agus Haryanto diberi kepercayaan menjadi Ketua Jurusan Hubungan Internasional di kampus Universitas Jenderal Soedirman dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional se-Indonesia (AIHII). Penulis telah menulis tiga buku dan empat *book chapter*, diantaranya adalah buku berjudul *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek* pada tahun 2016, *Teori Pembangunan Internasional* pada tahun

2017, serta *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara* pada tahun 2020. Penulis bisa dihubungi melalui email agus.haryanto@unsoed.ac.id.